

FAKTOR-FAKTOR DOMINAN TERJADINYA

PERCERAIAN TAHUN 2013

(studi kasus di Pengadilan Agama Pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1
tahun 1974)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat S-I Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



EKA SYLVIATUN NI'MAH

A.220100025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKA SYLVIATUN NI'MAH
Nim : A220100025
Fakultas/progdi : FKIP/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jenis : Skripsi
Judul : FAKTOR-FAKTOR DOMINAN TERJADINYA
PERCERAIAN TAHUN 2013 (studi kasus di Pengadilan
agm Pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun
1974)

Dengan inimenyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikann hak bebas royalty perpustakaan UMS atau penulis karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcoy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia untuk menjamin dan menanngung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 Mei 2014

Yang menyerahkan



EKA SYLVIATUN NI'MAH

A220100025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I-Pabelan, Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta

57102

Surat Persetujuan Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. H. Achmad Muhibbin, M.Si

Nik : 411

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi tugas akhir dari mahasiswa

Nama : EKA SYLVIATUN NI'MAH

Nim : A220100025

Fakultas/progdi : FKIP/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jenis : Skripsi

Judul : FAKTOR-FAKTOR DOMINAN TERJADINYA PERCERAIAN
TAHUN 2013 (studi kasus di Pengadilan Agama Pati dalam
perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dapat dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta. 08 Mei 2014

Yang menyerahkan


Drs. H. Achmad Muhibbin, M. Si

NIK. 411

ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR DOMINAN TERJADINYA
PERCERAIAN TAHUN 2013

(studi kasus di Pengadilan Agama pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974)

Eka Sylviatun Ni'mah, A220100025, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014,
xv + 154 halaman (termasuk lampiran)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dominan terjadinya perceraian tahun 2013, subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan secara deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan pedoman observasi, pedoman wawancara terstruktur, dan telaah dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber data, dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini dengan menerapkan model analisis interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Adanya perceraian di Pengadilan Agama Pati karena krisis moral dan tidak ada tanggung jawab, (2) Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Pati dengan melaksanakan pertemuan antara kedua belah pihak didampingi pihak mediator, (3) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan adalah faktor alam, waktu mediasi lama, sudah ada bukti yang jelas dengan menghadirkan dua saksi, (4) Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan persidangan adalah menunda persidangan menunggu sampai banjirnya surut, melaksanakan sidang perceraian harus sabar, dan apabila solusi tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan, maka perceraian adalah salah satu solusinya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati karena krisis moral dan tidak ada tanggung jawab, proses persidangannya berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala-kendala tetapi dapat teratasi.

Kata kunci: *Faktor-faktor Dominan, Perceraian, Upaya Mediasi, Kendala, dan Solusi.*

Surakarta, 08 Mei 2014
Penulis

Eka Sylviatun Ni'mah

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya mempunyai kodrat, yaitu memiliki hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Manusia dilahirkan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, dan saling membutuhkan. Menurut Idallayli (2010), perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara. Perkawinan merupakan perjanjian yang sah, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena merupakan amalan sunnah para Nabi. Undang-Undang perkawinan menyangkut hukum perkawinan campuran, hukum perceraian, dan hukum agama.

Mengantisipasi dan godaan terhadap keutuhan keluarga, perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya perceraian. Menurut Fauzi (2010), perceraian adalah pelepasan tali perkawinan dan pemutusan hubungan antara suami isteri dengan adanya sebab dari beberapa sebab. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian. Secara moral, perceraian sebagai perbuatan yang paling dimurkai Allah SWT, walaupun di bolehkan. Oleh karena itu, semuanya harus diberikan dalam batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dari hubungan kedua belah pihak, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Apabila kedua belah pihak berselisih dan tidak bisa diatasi lagi, istri dapat membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan jalan mengembalikan sejumlah harta yang dahulu pernah diterimanya sebagai mas kawin. Pada tahun 2013, angka perceraian di Pengadilan Agama Pati meningkat. Sehingga dimungkinkan jumlahnya masih akan terus bertambah, yang cerai tidak hanya pasangan tua. Pasangan muda-mudi juga cukup banyak untuk melakukan perceraian. Peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, hal ini peneliti ingin mengadakan penelitian faktor-faktor dominan terjadinya perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Alasan dipilihnya di Pengadilan Agama Pati sebagai lokasi penelitian, karena di tempat ini terdapat banyak kasus mengenai perceraian.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdullah dan Saebani (2013:17), perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah.
2. Syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 - 12, syarat-syarat perkawinan adalah:
 - a. perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
 - b. Melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
 - c. Usia calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun bagi seorang laki-laki, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
 - d. Perkawinan dilarang antara dua orang apabila memiliki hubungan darah dalam garis keturuann lurus ke bawah maupun ke atas.
 - e. Seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain dilarang menikah lagi.
 - f. Apabila suami istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka dilarang melangsungkan perkawinan.
 - g. Seorang wanita tidak dalam masa waktu tunggu.
 - h. Cara pelaksanaan perkawinan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Tujuan Perkawinan. Menurut Syarafuddin dkk. (2013:108), tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Prinsip perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1-31, prinsip perkawinan adalah:

- a. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Perkawinan disetujui oleh kedua belah pihak.
 - d. Sudah cukup umur untuk menikah.
 - e. Hak dan kewajiban suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.
 - f. Hak dan kewajiban suami istri.
5. Hak dan kewajiban suami istri. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 30-34, hak dan kewajiban suami istri adalah:
- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur yaitu menegakkan rumah tangga.
 - b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.
 - c. Suami istri memiliki kediaman yang tetap.
 - d. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
 - e. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - f. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik.
 - g. Apabila suami istri lalai dengan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
6. Pengertian perceraian. Menurut Latif (1982:40), *thalaq* berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan. Menurut Abdullah dan Saebani (2013:60), perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal, meskipun tujuan perkawinan membangun keluarga yang kekal dan bahagia.

7. Alasan perceraian. Menurut Ramulyo (2002:152-153), menjelaskan bahwa

alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penuyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

8. Rukun perceraian. Menurut Mardani (2011:28-29), rukun *talak* dibagi menjadi dua macam, yaitu *talak sharih* dan *talak kinayah*. *Talak sharih* adalah suami mengatakan secara tegas mengenai kata-kata perceraian. *Talak sharih* rukunnya dibagi menjadi tiga yaitu yang menalak (suami), ditalak (istri), lafadz (tanpa niat). Sedangkan *talak kinayah* ialah suami tidak menggunakan kata-kata perceraian dengan tegas melainkan dengan sindiran. *Talak kinayah* rukunnya dibagi menjadi empat macam yaitu menalak, ditalak, niat, dan lafadz.

9. Tata cara perceraian. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40, cara perceraian adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan. Hal ini mengajukan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan tetapi masyarakat adat belum mengetahui. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, tata cara perceraian adalah:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

10. Syarat-syarat perceraian. Menurut Latif (1982:44), syarat-syarat menjatuhkan perceraian adalah:

- a. Sudah dewasa.
- b. Berpikiran sehat.
- c. Mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak *talaq*.

Menurut Mardani (2011:28), syarat-syarat perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dipaksa, atau
- 2) Sehat akal, atau
- 3) Tidak keadaan mabuk (disengaja).

11. Sebab-sebab perceraian. Menurut Hadikusuma (1990:172-174), sebab-sebab terjadinya perceraian dari suatu perkawinan memiliki 4 (empat) indikator yaitu:

- a. Perzinahan.
- b. Tidak memberi nafkah.
- c. Penganiayaan.
- d. Perselisihan.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini adalah diwilayah Pati. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2014. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9-10), jenis-jenis metode penelitian diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Strategi merupakan suatu cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Arikunto (2010:185), penelitian khusus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat. Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor dominan terjadinya perceraian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer. Data primer diperoleh melalui beberapa cara yaitu:
 - a. Informan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau informan adalah Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat.
 - b. Tempat dan peristiwa. Tempat di Pengadilan Agama Pati. Peristiwanya mengenai faktor-faktor dominan terjadinya perceraian tahun 2013 (studi kasus di Pengadilan Agama Pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974).
2. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis seperti buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang didapat dari pihak terkait faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Triangulasi sumber data yaitu berupa informasi dari Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat. Triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yaitu dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Bagian ini peneliti akan mendiskripsikan hasil penemuan yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Perkawinan adalah hubungan suami istri yang sah sesuai dengan agama dan negara dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, adapunn faktor-faktor dominan terjadinya perceraian yaitu krisis moral dan tidak ada tanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di

Pengadilan Agama Pati terdapat dua yaitu krisis moral dan tidak ada tanggung jawab.

1. Krisis Moral

Krisi moral merupakan krisis yang menimpa moral, merampas moralitas, dan etika sosial bersama. Kris moral dapat ditandai dengan dua gejala yaitu tirani dan keterasingan. Tirani merupakan gejala dari rusaknya perilaku sosial, sedangkan keterasingan merupakan dimana seseorang merasa dikucilkan dan tidak lagi dianggap dalam kehidupan masyarakat. Uraian mengenai krisis moral dalam penelitian ini adalah:

- a. Krisi moral terjadi karena salah satu Penggugat dan Tergugat melakukan selingkuh, berjudi.
- b. Terjadinya krisis moral karena minimnya pendidikan yang kurang.

2. Tidak ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab merupakan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami atau istri. Tidak ada tanggung jawab dapat ditandai dengan adanya salah satu pihak tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, arti dari kodrati itu sendiri adalah sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap orang dibebani dengan tanggung jawab. Uraian mengenai tidak ada tanggung jawab dalam penelitian ini adalah:

- a. Tidak ada tanggung jawab ditandai dengan tidak ada pemberian nafkah secara lahir maupun batin oleh pasangan suami istri itu sendiri.
- b. Salah satu pasangan baik suami maupun istri meninggalkan kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan pada bab IV, penelitian ini yang berjudul Faktor-Faktor Dominan Terjadinya Perceraian Tahun 2013 (studi kasus di Pengadilan Agama Pati dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini.

1. Kesimpulan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan melalui indikator yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Faktor-faktor dominan terjadinya perceraian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Krisis moral. Sebab-sebab perceraian yang dikarenakan krisis moral tahun 2013 adalah 481 kasus. Terjadinya krisis moral karena seseorang memiliki akhlak yang buruk, berselingkuh, berjudi dan suka mabuk-mabukan.
- 2) Tidak ada tanggung jawab. Sebab-sebab perceraian yang dikarenakan tidak ada tanggung jawab tahun 2013 adalah 1167 kasus. Terjadinya tidak ada tanggung jawab karena suami tidak mendapatkan pekerjaan dan minimnya pendidikan.

b. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Pati, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Perzinahan. Upaya mediasi yang dilakukan dengan pihak Penggugat Tergugat didampingi mediator, pihak KUA memberikan sebuah nasehat agar perceraian dibatalkan. Upaya mediasi berlangsung kurang efektif karena yang berhasil hanya 281 kasus dari 481 perkara (58,41%). Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan kurang berhasil yang dikarenakan pihak Tergugat belum bisa merubah sikap yang dikarenakan waktu menikah yang usianya masih dini masih mencari kesenangan sesaat.
- 2) Tidak memberi nafkah. Upaya mediasi yang dilakukan adalah pihak KUA memberikan nasehat agar kembali hidup rukun dan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* apabila kedua belah pihak datang di persidangan dengan didampingi pihak ketiga yaitu mediator. Upaya mediasi berlangsung secara efektif karena yang berhasil 789 kasus dari 1167 perkara (67,60%).
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Upaya mediasi yang dilakukan adalah kedua belah pihak dipertemukan dalam satu ruangan dengan didampingi mediator agar kembali hidup rukun dan membangun keluarga

yag bahagia. Upaya mediasi berjalan efektif karena yang berhasil didamaikan 36 kasus dari 46 perkara (78,26%).

- 4) Perselisihan. Upaya mediasi yang dilakukan adalah didampingi pihak mediator dan pihak KUA memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar dibatalkan gugatannya. Upaya mediasi berjalan efektif karena yang berhasil 72 perkara dari 105 kasus (68,57%).

c. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sidang perceraian di PA Pati, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA, Penggugat, dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Perzinahan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah faktor alam yaitu dengan adanya bencana banjir, salah satu pihak sudah ingin bercerai karena sudah memiliki orang lain, pihak Penggugat dan Tergugat gaduh dalam persidangan.
- 2) Tidak memberi nafkah. Kendala-kendala yang dihadapi adalah faktor alam seperti bencana banjir, salah satu pihak sudah memiliki pasangan yang baru dan melupakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri baik lahir maupun batin.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kendala-kendala yang dihadapi adalah faktor alam seperti bencana alam, menyiapkan dua orang saksi yang tahu waktu kejadiannya dan hasil visum dari dokter apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- 4) Perselisihan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah faktor alam seperti bencana banjir, saat mediasi dilakukan sangat lama, dan kekawatiran antara Penggugat dan Tergugat saat berjalanya persidangan perceraian akan berjalan lama.

d. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Pati, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim, Panmud Hukum, Ketua KUA adalah dengan cara memberikan konfirmasi kepada kedua belah pihak jika kantor pengadilan ditutup, pasangan suami istri harus bisa meredam amarahnya agar tidak terjadi

perselisihan, dan diharapkan dapat mengatasi semua permasalahannya agar tidak terjadi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsmi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, Zaenal Abidin. 2010. Perceraian Menurut Hukum Islam. (<http://zabidin-fauzi.blogspot.com/2010/02/perceraian-menurut-ketentuan-hukum.html>). Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 15.05 WIB.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonsia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Idallayli, Ani Noviana. 2010. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (<http://www.aninovinablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraian-menurut-hukum-islam.html>). Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 16.30 WIB.
- Latif, Djamil. 1982. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- RI. 1974. *Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Rona Publishing.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syarafuddin, dkk. 2013. *Studi Islam 2*. Surakarta: LPIK Universitas Muhammadiyah Surakarta.